

**ANALISIS YURIDIS PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Bayu Prastyo Widodo

2110111112

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

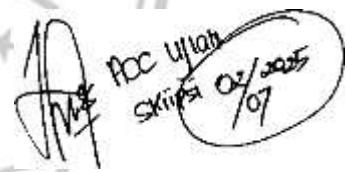
Nama : Bayu Prastyo Widodo

NIM 2110111112

Judul : Analisis Yuridis Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Pengusulan Pemberhentian Presiden Berdasarkan Undang-
Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 02 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text "PDC Uyan", "SKIPSA", and the date "02/07/2025".

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

Sekretaris,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK: 19880117117003781

Anggota


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Prastyo Widodo

NIM : 21101111

Judul : Analisis Yuridis Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Pengusulan Pemberhentian Presiden Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Bayu Prastyo Widodo.
NIM: 2110111112

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus sebagai ketua penguji
2. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus sebagai sekretaris penguji
3. Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing
4. Dan seluruh keluarga, teman dan rekan-rekan semuanya yang men-support saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peran DPD selaku bagian dari perwakilan rakyat daerah dalam proses *impeachment* Presiden yang dimana perannya di rasa oleh penulis sangat kurang, terlebih khusus lagi perannya dalam proses pemakzulan atau *impeachment* presiden. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini yang bisa penulis sampaikan.

MOTTO

“COGITO ERGO SUM”

- Descartes -



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengusulan Pemberhentian Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Proses pemberhentian Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan prinsip *checks and balances*, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara negara. Namun, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses tersebut masih menimbulkan perdebatan akademis, mengingat kedudukan dan kewenangan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya di aktualisasikan. Penulis tertarik untuk menganalisis posisi hukum DPD dalam konteks pengusulan pemberhentian Presiden guna memberikan klarifikasi teoritis serta membandingkan dengan negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan yuridis peran DPD dalam mekanisme pengusulan pemberhentian Presiden, mengevaluasi konsistensinya dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan sistem ketatanegaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Kedaulatan Rakyat (<i>Popular Sovereignty Theory</i>)	12
2.2 Teori Negara Hukum.....	14
2.3 Teori <i>Check and balances</i>	15
2.4 Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Trias Politica</i>)	19

2.5 Teori Perwakilan Politik (<i>Political Representation</i>).....	22
2.6 Mekanisme atau Konsep Pemberhentian Presiden (<i>impeachment</i>) di Beberapa Negara	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konteks Teoritis	28
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34

